



Tinjauan Pustaka

Naskah dikirim: 22/03/2026 – Selesai revisi: 14/04/2026 – Disetujui: 16/05/2026 – Diterbitkan: 01/06/2026

Penguatan Kebijakan Pendidikan melalui Analisis Model Dunn

Windisyah Putra, Wita Mentari N.

IAIN Takengon, Indonesia

STIT Al Washliyah Aceh Tengah

e-mail: windisyah84@gmail.com, wmentari981@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi model Forms and Strategies of Policy Analysis William N. Dunn dalam memperkuat kebijakan pendidikan berbasis bukti (evidence-based educational policy). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik, buku kebijakan publik, artikel jurnal, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap konsep utama dalam model Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Dunn menyediakan kerangka analisis yang komprehensif melalui tahapan problem structuring, forecasting, prescription, monitoring, evaluation, dan practical inference yang dapat digunakan untuk memperkuat kualitas kebijakan pendidikan. Model ini membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan secara tepat, memprediksi dampak kebijakan, merumuskan alternatif solusi, serta melakukan evaluasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan model Dunn dapat menjadi pendekatan strategis dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan; Model Dunn; Analisis Kebijakan; Evidence-Based Policy; Tata Kelola Pendidikan.

Strengthening Education Policy through an Analysis of the Dunn Model

Abstract: Cette étude a pour objectif d'analyser la contribution du modèle « Forms and Strategies of Policy Analysis » de William N. Dunn au renforcement des politiques éducatives fondées sur des données probantes (evidence-based educational policy). Elle adopte une approche qualitative et utilise la méthode de la recherche documentaire (library research). Les données ont été recueillies à partir de diverses sources : ouvrages universitaires, manuels sur les politiques publiques, articles de revues et documents pertinents relatifs aux politiques éducatives. L'analyse des données a été réalisée à l'aide de la technique d'analyse de contenu (content analysis) à travers un processus d'identification, de classification, d'interprétation et de synthèse des concepts clés du modèle de Dunn. Les résultats de la recherche montrent que le modèle de Dunn fournit un cadre d'analyse complet, comprenant les étapes suivantes : structuration du problème, prévision, prescription, suivi, évaluation et inférence pratique, qui peuvent être utilisées pour renforcer la qualité des politiques éducatives. Ce modèle aide les décideurs à identifier avec précision les causes profondes des problèmes éducatifs, à prévoir l'impact des politiques, à formuler des solutions alternatives et à mener une évaluation fondée sur des données probantes afin d'améliorer l'efficacité des politiques. Cette étude confirme que l'application du modèle de Dunn peut constituer une approche stratégique pour mettre en place une gouvernance de l'éducation plus réactive, plus adaptative et axée sur l'amélioration continue de la qualité de l'éducation.

Keywords: Education Policy; Dunn's Model; Policy Analysis; Evidence-Based Policy; Education Governance.

Hak Cipta©2026 Windisyah Putra, Wita Mentari N.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.



1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi indikator penting dalam menentukan daya saing suatu negara. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis melalui kebijakan alokasi anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, peningkatan investasi pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek pendanaan, tetapi juga menyangkut efektivitas desain kebijakan, kualitas implementasi, mekanisme evaluasi, serta kapasitas aktor pendidikan dalam menjalankan kebijakan tersebut (OECD, 2023; UNESCO, 2023).

Dalam kajian kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi sangat bergantung pada kualitas proses analisis sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam memecahkan masalah publik melalui tahapan identifikasi masalah, prediksi konsekuensi, formulasi alternatif, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang efektif membutuhkan pendekatan analitis yang mampu menghubungkan antara bukti empiris, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan.

Salah satu persoalan penting dalam kebijakan pendidikan Indonesia adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan karena memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Oleh sebab itu, pengembangan profesional guru harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, evaluasi berkelanjutan, dan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Darling-Hammond, 2017).

Meskipun berbagai program peningkatan kompetensi guru telah dilakukan, kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan OECD melalui PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD, yang menunjukkan perlunya penguatan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh (OECD, 2023). Selain itu, laporan UNESCO (2023) menegaskan bahwa kualitas guru, sistem pengembangan profesional, dan efektivitas tata kelola pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan administratif atau peningkatan anggaran, tetapi membutuhkan analisis kebijakan yang mampu mengidentifikasi akar persoalan, memprediksi dampak kebijakan, mengevaluasi implementasi, serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti. Dalam konteks ini, model *Forms and Strategies of Policy Analysis* yang dikembangkan oleh Dunn menjadi relevan karena menyediakan kerangka analisis yang mengintegrasikan pendekatan prospektif (*ex ante*) dan retrospektif (*ex post*) dalam memahami kinerja kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan pendidikan, masih terbatas kajian yang secara khusus menggunakan kerangka analisis Dunn sebagai pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi model *Forms and Strategies of Policy Analysis* dalam penguatan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penggunaan model Dunn dalam konteks pendidikan serta memberikan implikasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, dan strategi analisis kebijakan pendidikan berdasarkan kajian literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber akademik, seperti buku teori kebijakan publik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan peningkatan mutu pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap sumber-



sumber yang relevan dengan fokus penelitian, terutama teori *Forms and Strategies of Policy Analysis* yang dikembangkan oleh Dunn. Literatur yang dikaji dianalisis berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu identifikasi masalah kebijakan (*problem structuring*), prediksi dampak kebijakan (*forecasting*), perumusan alternatif kebijakan (*prescription*), pemantauan implementasi (*monitoring*), evaluasi kebijakan (*evaluation*), dan pengambilan kesimpulan berbasis bukti (*practical inference*) menurut (Dunn, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber literatur sesuai dengan tema penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan model analisis kebijakan Dunn dalam kajian kebijakan pendidikan. Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan dokumen kebijakan dari sumber yang berbeda. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan rekomendasi praktis mengenai pentingnya analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Pendidikan sebagai Pendekatan Strategis dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perubahan sistem pendidikan menuju peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan penguatan daya saing sumber daya manusia. Namun, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau besarnya dukungan anggaran, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses analisis kebijakan yang mendasarinya. Dalam perspektif kebijakan publik, analisis kebijakan berfungsi sebagai mekanisme ilmiah untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam memahami masalah, memilih alternatif tindakan, serta mengevaluasi konsekuensi kebijakan (Dunn, 2018).

Dunn memandang analisis kebijakan sebagai proses multidisipliner yang menghubungkan metode ilmiah, teori sosial, dan pertimbangan nilai untuk menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pertanyaan mengenai apa kebijakan yang dibuat, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut diperlukan, bagaimana implementasinya berlangsung, dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini menjadi semakin penting karena permasalahan pendidikan merupakan persoalan kompleks (*complex policy problems*) yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta faktor sosial yang saling berhubungan.

Dalam konteks Indonesia, peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan bentuk komitmen negara terhadap pembangunan pendidikan. Namun, investasi finansial tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada aspek input, tetapi juga pada kualitas desain kebijakan, kapasitas implementasi, sistem pengawasan, dan mekanisme evaluasi. Oleh karena itu, pendekatan analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy analysis*) menjadi kebutuhan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan memiliki dasar empiris yang kuat.

Model *Forms and Strategies of Policy Analysis* yang dikembangkan oleh Dunn memberikan kerangka analitis yang sistematis karena menghubungkan proses identifikasi masalah, prediksi kebijakan, formulasi alternatif, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan. Kerangka ini menempatkan kebijakan sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan, bukan sebagai keputusan administratif yang berhenti setelah kebijakan ditetapkan.

Problem Structuring: Ketepatan Identifikasi Masalah sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan

Tahap pertama dalam model Dunn adalah *problem structuring*, yaitu proses mendefinisikan dan memahami masalah kebijakan secara sistematis. Tahap ini memiliki posisi fundamental karena kualitas solusi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memahami akar persoalan. Dunn menjelaskan bahwa kesalahan terbesar dalam analisis kebijakan sering kali bukan karena kegagalan menemukan solusi, tetapi karena kesalahan dalam menentukan masalah yang sebenarnya harus diselesaikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan Indonesia, persoalan rendahnya kualitas pendidikan sering kali dipahami secara sederhana sebagai akibat keterbatasan anggaran atau sarana prasarana. Padahal, berbagai penelitian



menunjukkan bahwa kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor kualitas guru, sistem pengembangan profesional, kepemimpinan sekolah, budaya organisasi, serta efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, pendekatan problem structuring mengharuskan pembuat kebijakan melakukan diagnosis secara lebih mendalam terhadap persoalan pendidikan. Misalnya, kebijakan peningkatan kompetensi guru tidak cukup hanya dilakukan melalui program pelatihan secara massal, tetapi harus diawali dengan analisis kebutuhan kompetensi berdasarkan kondisi aktual guru. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat umum, tetapi lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pendidikan harus dibangun berdasarkan pemahaman terhadap akar masalah (root causes), bukan hanya berdasarkan gejala yang tampak. Kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan menyebabkan kebijakan menjadi kurang efektif karena intervensi yang dilakukan tidak menyentuh faktor penyebab utama.

Forecasting: Membangun Kebijakan Pendidikan Berorientasi Masa Depan

Tahap kedua dalam model Dunn adalah forecasting, yaitu proses memperkirakan kemungkinan dampak yang muncul dari berbagai alternatif kebijakan. Dalam kebijakan pendidikan, forecasting memiliki peran penting karena keputusan pendidikan biasanya menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kebijakan peningkatan kualitas guru, misalnya, tidak dapat hanya dievaluasi berdasarkan jumlah guru yang mengikuti pelatihan, tetapi harus dianalisis berdasarkan kemungkinan perubahan kompetensi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, forecasting membantu pemerintah memilih kebijakan yang memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan membutuhkan orientasi preventif dan strategis. Pemerintah tidak hanya merespons permasalahan yang sudah terjadi, tetapi juga mampu memprediksi tantangan pendidikan masa depan seperti digitalisasi pembelajaran, perubahan kebutuhan kompetensi abad ke-21, dan transformasi profesi guru. Dalam perspektif tata kelola pendidikan modern, forecasting juga memperkuat penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh prediksi berbasis data berpotensi menghasilkan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prescription: Merumuskan Alternatif Kebijakan yang Efektif dan Kontekstual

Tahap prescription dalam model Dunn berkaitan dengan penyusunan rekomendasi atau alternatif kebijakan berdasarkan hasil analisis masalah dan prediksi dampak. Tahap ini menegaskan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya bertugas mengidentifikasi masalah, tetapi juga harus mampu menghasilkan pilihan solusi yang efektif. Dalam kebijakan pendidikan, proses perumusan alternatif harus mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kesiapan implementasi. Sebagai contoh, kebijakan peningkatan profesionalisme guru tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan jumlah pelatihan, tetapi perlu mempertimbangkan model pengembangan profesional yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan, dan terintegrasi dengan sistem evaluasi kinerja.

Menurut Weimer dan Vining (2017), analisis kebijakan yang baik harus mampu menghubungkan antara alternatif kebijakan dengan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Oleh sebab itu, prescription dalam model Dunn memberikan ruang bagi pemerintah untuk memilih kebijakan yang tidak hanya ideal secara teoritis, tetapi juga realistis dalam implementasi. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan harus memperhatikan keberagaman kondisi daerah. Kebijakan pendidikan nasional perlu memiliki standar umum, tetapi tetap memberikan ruang adaptasi sesuai karakteristik lokal.

Monitoring dan Evaluation: Mengukur Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan

Tahapan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa monitoring menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, monitoring berfungsi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan desain awal. Namun, evaluasi memiliki peran yang lebih luas karena tidak hanya melihat keberlangsungan program, tetapi juga mengukur dampak yang dihasilkan.

Salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah kecenderungan evaluasi yang lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan perubahan substantif. Misalnya, keberhasilan program peningkatan kompetensi guru sering diukur berdasarkan jumlah peserta pelatihan, bukan



berdasarkan perubahan praktik pembelajaran dan peningkatan kualitas peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan perlu menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengukur aspek input, proses, output, outcome, dan impact. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas kebijakan serta menentukan langkah perbaikan pada masa mendatang.

Practical Inference: Penguatan Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti

Komponen terakhir dalam model Dunn adalah practical inference, yaitu proses menghubungkan hasil analisis empiris dengan keputusan kebijakan. Tahap ini menunjukkan bahwa tujuan utama analisis kebijakan bukan hanya menghasilkan pengetahuan akademik, tetapi memberikan dasar rasional bagi tindakan kebijakan. Dalam konteks pendidikan, practical inference memungkinkan hasil penelitian, data evaluasi, dan pengalaman implementasi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau administratif, tetapi juga pada bukti ilmiah. Pendekatan ini mendukung paradigma evidence-based educational governance, yaitu tata kelola pendidikan yang menempatkan data, penelitian, dan evaluasi sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Implikasi Model Dunn terhadap Penguatan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Berdasarkan keseluruhan analisis, model *Forms and Strategies of Policy Analysis* Dunn memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas kebijakan pendidikan. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada formulasi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memahami masalah, memprediksi konsekuensi, memilih alternatif terbaik, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan model Dunn memberikan beberapa implikasi strategis yakni penguatan diagnosis masalah pendidikan melalui analisis berbasis data; peningkatan kualitas perencanaan kebijakan melalui forecasting; pengembangan alternatif kebijakan yang kontekstual sesuai kebutuhan daerah; penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome; dan pengembangan tata kelola pendidikan berbasis bukti (*evidence-based policy governance*).

Dengan demikian, model Dunn tidak hanya relevan sebagai kerangka teoritis dalam analisis kebijakan, tetapi juga dapat menjadi instrumen praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia. Strategi analisis kebijakan mengubah informasi sebelum pengambilan tindakan kebijakan dan menganalisis keputusan. Model *Forms and Strategies of Policy Analysis* menurut Dunn menunjukkan bahwa analisis kebijakan merupakan proses yang bersifat siklik dan berbasis bukti, yang mengintegrasikan tahapan *problem structuring*, *forecasting*, *prescription*, *monitoring*, dan *evaluation* secara berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional, adaptif, dan akuntabel melalui pemanfaatan umpan balik dari hasil evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan. Sehingga model Dunn menjadi kerangka analisis yang relevan dalam mendukung praktik *evidence-based policymaking* dan peningkatan kualitas kebijakan publik secara berkesinambungan.

4. Simpulan dan Saran

Model *Forms and Strategies of Policy Analysis* Dunn memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kompleksitas kebijakan pendidikan. Melalui integrasi tahapan *problem structuring*, *forecasting*, *prescription*, *monitoring*, *evaluation*, dan *practical inference*, model ini memungkinkan kebijakan pendidikan dianalisis secara sistematis berdasarkan bukti empiris. Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan ini dapat membantu mengatasi kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasi melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kebijakan berbasis bukti menjadi pendekatan penting dalam membangun tata kelola pendidikan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu Pendidikan.

5. Daftar Pustaka

Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.

Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (5th ed.). Routledge.



- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis* (5th ed.). Pearson.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hermawan, A., Supiana, S., & Rahman, A. (2020). Analisis kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 145–158.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice* (6th ed.). Routledge.